

ABSTRAK

ZELFENO NAFS KHARISMA, NPM. 20.22.336 : JUDUL “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan)”. Dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP., sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Eka Santi Agustina, S.Sos., M.M., CIQaR., CIQnR., sebagai Dosen Pembimbing II

Semenjak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, pelaksanaannya sampai saat ini masih kurang optimal khususnya dalam konteks sampah khusus. Permasalahan yang terlihat yakni masih terdapat masyarakat yang menumpuk sampah khusus, dan masyarakat tidak menggunakan jasa Disperkim-LH untuk mengantar sampah khususnya ke TPA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan serta faktor faktor yang mendukung maupun menghambat dalam implementasi tersebut di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teori implementasi model Thomas B. Smith. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara tersamar atau terang-terangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan Model Miles & Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *member check*.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan dikategorikan kurang baik. Adapun sub variabel yang sesuai dengan teori yakni: kebijakan yang diinginkan; dan faktor-faktor lingkungan. Sedangkan sub variabel yang tidak sesuai dengan teori yakni: kelompok sasaran; dan organisasi pelaksana. Adapun faktor yang mendukung dalam implementasi ini yakni adanya instruksi untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan sampah oleh bupati dan wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi ini yakni: asumsi bahwa lebih *urgent* Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan; tidak ada sosialisasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini; dan tidak ada evaluasi dari SKPD teknis (Disperkim-LH) terkait kebijakan ini.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada: Kepala Disperkim-LH; Kepala Satpol-PP & PK; masyarakat yang memiliki sampah khusus terutama yang rutin seperti usaha mebel dan sejenisnya; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan penelitian yang akan datang.

ABSTRACT

ZELFENO NAFS KHARISMA, NPM. 20.22.336. TITLE : “IMPLEMENTATION PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN IN CENTRAL AMUNTAI DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY (A Case Study of Special Waste in Environmental Cleanliness).” This research was supervised by Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP. as Supervisor I and Eka Santi Agustina, S.Sos., M.M., CIQaR., CIQnR. as Supervisor II.

Since the enactment of Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, its implementation has remained suboptimal, particularly in the context of special waste. The problems observed include the persistence of communities accumulating special waste and the lack of utilization of the Disperkim-LH services for transporting special waste to the landfill (TPA). Based on these conditions, this study aims to examine the implementation of Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, with a case study on special waste in environmental cleanliness, as well as to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation in Central Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency.

This research employs a qualitative-descriptive approach using Thomas B. Smith's policy implementation model. Data collection techniques include covert or overt observation, structured interviews, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling, involving a total of 11 informants. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. Data credibility was ensured through prolonged engagement, increased persistence, triangulation, the use of reference materials, and member checking.

The results indicate that the implementation of Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan in Central Amuntai District, Hulu Sungai Utara Regency, with a case study on special waste in environmental cleanliness, is categorized as inadequate. The sub-variables that align with the theory include the intended policy and environmental factors, while the sub-variables that do not align with the theory include the target group and implementing organization. Supporting factors in this implementation include instructions from the Regent and Vice Regent of Hulu Sungai Utara Regency to collaborate in addressing waste management issues. Meanwhile, the inhibiting factors include the assumption that Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah is more urgent than Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, the absence of socialization by the technical regional work unit (Disperkim-LH) regarding this policy, and the lack of evaluation by the technical regional work unit (Disperkim-LH) concerning this policy.

The recommendations in this study are addressed to the Head of the Department of Housing, Settlement Areas, and Environment; the Head of the Civil Service Police Unit and Fire Department; communities that generate special waste, particularly on a regular basis such as furniture businesses and similar enterprises; the Regional House of Representatives of Hulu Sungai Utara Regency; and future researchers.